

DAMPAK AMERIKA SERIKAT KELUAR DARI PERJANJIAN INTERMEDIATE-RANGE NUCLEAR FORCES (INF) TERHADAP STABILITAS KEAMANAN GLOBAL

Helmi Awan¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes the impact of the United States' withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty on August 2, 2019, on global security stability. Signed in 1987 by the US and the Soviet Union, the INF Treaty marked a milestone in controlling intermediate-range nuclear weapons. The US withdrawal was based on allegations of Russian violations, particularly the development of the 9M729 missile, which Russia denied. This decision sparked concerns among major powers, especially in Europe and the Asia-Pacific, about the resurgence of an arms race reminiscent of the Cold War. The impacts include heightened military tensions in Eastern Europe, strategic dilemmas for NATO members, and potential missile competition escalation in the Asia-Pacific between the US and China. Using a qualitative descriptive approach and literature study, this research identifies implications for the military and environmental sectors, and examines shifts in international alliance patterns. The findings reveal that the US exit from the INF weakens arms control regimes, increases the risk of strategic instability, and encourages offensive defense policies by major powers. The study recommends multilateral diplomacy to reduce escalation and build a new inclusive arms control regime.

Keywords: INF Treaty, global security, arms race, foreign policy.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak keputusan Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) pada 2 Agustus 2019 terhadap stabilitas keamanan global. INF, yang ditandatangani tahun 1987 oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, menjadi tonggak pengendalian senjata nuklir jarak menengah. Penarikan diri AS didasari tuduhan pelanggaran oleh Rusia, khususnya pengembangan rudal 9M729, yang dibantah Rusia. Keputusan ini memicu kekhawatiran negara-negara besar, terutama di Eropa dan Asia Pasifik, akan kembalinya perlombaan senjata seperti era Perang Dingin. Dampaknya meliputi peningkatan ketegangan militer di Eropa Timur, dilema strategis negara-negara NATO, serta potensi eskalasi persaingan rudal di Asia Pasifik antara AS dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka untuk mengidentifikasi implikasi pada sektor militer dan lingkungan, serta mengkaji perubahan pola aliansi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarnya AS dari INF memperlemah rezim pengendalian senjata, meningkatkan risiko ketidakstabilan strategis, dan mendorong kebijakan pertahanan ofensif oleh kekuatan besar. Penelitian ini merekomendasikan langkah diplomasi multilateral guna mengurangi eskalasi dan membangun rezim pengendalian senjata baru yang inklusif.

Kata Kunci: Perjanjian INF, keamanan global, perlombaan senjata, kebijakan luar negeri.

PENDAHULUAN

Senjata nuklir merupakan salah satu jenis senjata pemusnah massal yang memiliki daya destruktif luar biasa, mampu memusnahkan seluruh kota beserta penduduknya hanya dalam sekejap. Ancaman yang ditimbulkan tidak hanya bersifat langsung melalui ledakan dan panas,

tetapi juga melalui radiasi yang menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sejak pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia II di kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, yang menewaskan lebih dari 60.000-80.000 jiwa secara langsung serta memaparkan radiasi pada sekitar 135.000 orang, senjata nuklir menjadi momok menakutkan bagi komunitas internasional. Isu senjata nuklir sejak awal menjadi perdebatan penting dalam hubungan internasional karena menyangkut kelangsungan hidup manusia dan stabilitas sistem internasional. Setiap pembahasan mengenai kepemilikan, pengayaan, dan uji coba senjata nuklir selalu mengundang kontroversi di tingkat global, mengingat potensi ancaman yang ditimbulkan terhadap perdamaian internasional (Yuliana P.S et al., 2020).

Pada era Perang Dingin, dunia terbelah menjadi dua blok kekuatan besar, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Rivalitas ideologi, politik, dan militer kedua kekuatan ini memicu perlombaan senjata, termasuk pengembangan senjata nuklir. Untuk mengendalikan eskalasi tersebut, sejumlah perjanjian internasional lahir. Salah satunya adalah *Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty*, yang ditandatangani pada 8 Desember 1987 oleh Presiden AS Ronald Reagan dan Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev setelah melalui negosiasi panjang selama tujuh tahun.

Perjanjian INF menjadi terobosan penting dalam sejarah kontrol senjata karena mengubah paradigma dari sekadar pengendalian jumlah senjata (*arms control*) menjadi pengurangan senjata (*arms reductions*). Perjanjian ini mengatur penghapusan seluruh rudal balistik dan rudal jelajah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan antara 500 hingga 5.500 kilometer. Implementasi yang dimulai 1 Juni 1988 berhasil memusnahkan 2.692 rudal: 1.846 milik Uni Soviet (SS-4, SS-5, SS-20, dan SS-23) dan 846 milik Amerika Serikat (Pershing II dan Gryphon GLCM). Selain menghapus rudal-rudal tersebut, INF juga berperan menurunkan ketegangan militer di Eropa Barat, khususnya akibat penempatan SS-20 Uni Soviet dan Pershing II milik AS. Keberhasilan ini membuat INF dianggap sebagai pilar utama stabilitas strategis di kawasan Eropa selama lebih dari tiga dekade (Lanoszka, 2019).

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Amerika Serikat memastikan kelanjutan perjanjian ini dengan enam negara penerus Soviet yang memiliki rudal dilarang INF, yaitu Rusia, Belarus, Kazakhstan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Dengan demikian, sifatnya berubah dari perjanjian bilateral menjadi multilateral terbatas. Namun, tantangan baru muncul dari negara-negara yang tidak menjadi pihak INF, seperti Tiongkok, Korea Utara, India, Pakistan, dan Iran, yang terus mengembangkan rudal jarak menengah.

Sejak pertengahan 2000-an, kecurigaan Amerika Serikat terhadap kepatuhan Rusia semakin meningkat. Washington menuduh Moskow mengembangkan rudal jelajah darat 9M729 (SSC-8) yang memiliki jangkauan melampaui batas INF. Tuduhan ini didukung oleh laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS sejak 2014 yang menyebut Rusia telah melanggar ketentuan perjanjian. Sebaliknya, Rusia membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa

jangkauan 9M729 tidak melebihi 500 kilometer, dan menuduh balik AS melanggar INF melalui sistem peluncur Mk-41 Aegis Ashore di Eropa Timur.

Perselisihan ini memicu kebuntuan diplomatik. Pada 20 Oktober 2018, Presiden AS Donald Trump mengumumkan niat untuk keluar dari INF, menuding Rusia sebagai pihak yang tidak patuh. Meski Rusia sempat menawarkan transparansi dengan memamerkan 9M729, AS tetap pada pendiriannya. Penangguhan sementara berakhir ketika pada 2 Agustus 2019, AS secara resmi mengakhiri partisipasinya dalam INF. Keputusan ini menimbulkan gelombang reaksi internasional. Uni Eropa, melalui berbagai pejabatnya, menyatakan bahwa berakhirnya INF akan berdampak negatif terhadap keamanan global. Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, memperingatkan potensi konsekuensi serius bagi keamanan Eropa. Jepang dan sekutu AS lainnya di Asia Pasifik menyampaikan kekhawatiran serupa, sementara Tiongkok mendesak AS untuk mempertimbangkan kembali langkahnya. Dampak langsung terlihat di Eropa Timur. Rusia meningkatkan penyebaran sistem rudal di Kaliningrad, yang berbatasan dengan Polandia, Latvia, dan Lituania. Menurut data SIPRI, negara-negara Eropa Timur meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan, dengan Polandia menaikkan dari USD 13,6 miliar pada 2020 menjadi lebih dari USD 20 miliar pada 2023. Eropa Barat, khususnya Jerman dan Prancis, menghadapi dilema strategis terkait kemungkinan penempatan kembali rudal AS di wilayah mereka, yang berpotensi menjadikan mereka target utama dalam konflik dengan Rusia.

Di Asia Pasifik, runtuhnya INF memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata antara AS dan Tiongkok. Penempatan sistem rudal jarak menengah seperti Tomahawk atau *Long-Range Hypersonic Weapon* di Jepang atau Guam dipandang dapat memicu respons agresif dari Beijing, sekaligus memunculkan resistensi domestik di negara tuan rumah. Jepang, misalnya, menghadapi tekanan politik internal terkait risiko menjadi target serangan balasan Tiongkok. Bagi Amerika Serikat, keluarnya dari INF memberi kebebasan strategis untuk mengembangkan kembali rudal jarak menengah yang sebelumnya dilarang. Langkah ini dinilai penting untuk menyeimbangkan kekuatan militer Tiongkok di Indo-Pasifik sekaligus mempertahankan posisi dominan di Eropa. Namun, keuntungan strategis ini dibarengi risiko meningkatnya ketidakstabilan global, mengingat tidak adanya lagi mekanisme pengendalian senjata jarak menengah yang mengikat secara hukum. Rusia merespons dengan mempercepat produksi 9M729 dan mengembangkan senjata hipersonik seperti Avangard. Moskow juga memperingatkan bahwa setiap penempatan rudal AS di Eropa akan dihadapi dengan langkah balasan, termasuk kemungkinan menargetkan wilayah NATO.

Ketiadaan INF menciptakan kekosongan hukum internasional dalam pengendalian senjata jarak menengah. Potensi perlombaan senjata tidak hanya terjadi antara AS dan Rusia, tetapi juga melibatkan kekuatan lain seperti Tiongkok, India, dan negara-negara di Timur Tengah. Situasi ini memperburuk krisis kepercayaan dalam hubungan internasional dan menurunkan efektivitas rezim non-proliferasi global. Dalam konteks ini, keputusan AS keluar dari INF tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral dengan Rusia, tetapi juga mempengaruhi dinamika keamanan regional dan global. Eropa menghadapi ancaman langsung

terhadap stabilitasnya, Asia Pasifik menjadi medan baru persaingan strategis, dan dunia secara keseluruhan kehilangan salah satu instrumen terpenting dalam menjaga stabilitas strategis sejak Perang Dingin.

Oleh karena itu, isu ini menjadi relevan untuk diteliti secara mendalam. Analisis dampak keluarnya AS dari INF terhadap stabilitas keamanan global dapat memberikan pemahaman mengenai konsekuensi politik, militer, dan strategis dari runtuhnya salah satu pilar pengendalian senjata nuklir dunia. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi upaya diplomasi multilateral dalam membangun rezim pengendalian senjata yang lebih inklusif, melibatkan kekuatan-kekuatan besar di luar pihak INF sebelumnya, sehingga dapat meminimalkan risiko eskalasi konflik dan menjaga stabilitas keamanan internasional di masa depan.

Keluarnya AS dari INF juga memperburuk krisis kepercayaan dalam rezim pengendalian senjata internasional, yang sebelumnya menjadi mekanisme penting menjaga kestabilan strategis. Kekosongan aturan pasca-INF mempermudah negara-negara besar mengembangkan senjata yang sebelumnya dilarang, memperluas potensi perlombaan senjata di berbagai kawasan. Situasi ini menegaskan bahwa keberlanjutan stabilitas keamanan global pasca-INF membutuhkan inisiatif diplomatik multilateral. Negara-negara besar dan organisasi internasional perlu membangun rezim baru yang lebih inklusif, mencakup kekuatan-kekuatan yang sebelumnya di luar INF seperti China, India, dan Korea Utara, untuk mengurangi risiko eskalasi dan mengembalikan kepercayaan dalam sistem keamanan internasional.

KERANGKA ANALITIK

Penelitian ini menggunakan pendekatan neorealisme sebagai kerangka teoretis utama untuk menganalisis dampak keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian INF (*Intermediate-Range Nuclear Forces*) pada tahun 2019. Menurut Kenneth Waltz, neorealisme menekankan bahwa struktur sistem internasional yang anarkis memaksa negara-negara untuk bertindak dalam rangka mempertahankan keamanan dan kepentingan nasionalnya (Waltz, 1978). Dalam konteks ini, keputusan AS untuk keluar dari INF dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan distribusi kekuatan global, khususnya dengan munculnya ancaman dari Rusia dan China yang mengembangkan rudal jarak menengah di luar kerangka perjanjian tersebut.

Konsep *balance of power* menjadi instrumen analisis yang relevan untuk memahami dinamika yang terjadi pasca keluarnya AS dari INF. Sebagaimana dikemukakan oleh Waltz, *balance of power* merupakan mekanisme alamiah untuk mencegah dominasi satu negara dalam sistem internasional. Keluarnya AS dari perjanjian ini dapat dipandang sebagai upaya *hard balancing* untuk mengimbangi kekuatan militer Rusia dan China, sekaligus mempertahankan superioritas strategis AS di kawasan Eropa dan Asia-Pasifik.

Konsep security dilemma dari John Herz memberikan perspektif kritis terhadap dampak keputusan AS tersebut. Upaya AS untuk memperkuat keamanannya melalui pengembangan kembali rudal jarak menengah justru menciptakan ketidakamanan bagi negara lain, khususnya Rusia dan China. Kondisi ini memicu dilema interpretasi dan dilema respons, di mana setiap negara berusaha menginterpretasikan tindakan negara lain sebagai ancaman potensial, sehingga mendorong eskalasi perlombaan senjata (*arms race*) yang dapat mengancam stabilitas keamanan internasional.

Dalam konteks keamanan internasional, analisis menggunakan konsepsi Barry Buzan yang membagi ancaman keamanan ke dalam lima sektor: militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Buzan, 1983). Penelitian ini akan fokus pada sektor militer dan lingkungan, mengingat dampak langsung dari pengembangan senjata nuklir terhadap kedua sektor tersebut. Sektor militer menjadi fokus utama karena keluarnya AS dari INF berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir yang mengancam stabilitas regional dan global. Sementara sektor lingkungan relevan mengingat risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh pengembangan dan potensi penggunaan senjata nuklir.

Kerangka analitik ini juga mengintegrasikan konsep kepentingan nasional Hans J. Morgenthau, yang menekankan bahwa setiap negara berupaya melindungi identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara lain. Keputusan AS untuk keluar dari INF dapat dipahami sebagai manifestasi dari upaya melindungi kepentingan nasional AS dalam menghadapi perubahan lanskap keamanan global, khususnya dengan munculnya kekuatan rival seperti China di kawasan Indo-Pasifik.

Melalui kerangka analitik ini, penelitian akan mengkaji bagaimana keluarnya AS dari perjanjian INF menciptakan dinamika baru dalam sistem keamanan internasional, memicu perlombaan senjata, dan berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan global dari sistem yang relatif stabil menuju kondisi yang lebih tidak terprediksi dan rentan terhadap konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis dampak keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) terhadap stabilitas keamanan global. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena kompleks melalui analisis substansi makna dari peristiwa yang dikaji, sehingga dapat menghasilkan gambaran komprehensif mengenai implikasi keputusan AS tersebut terhadap dinamika keamanan internasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal akademik, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis mengenai

berbagai aspek yang berkaitan dengan perjanjian INF dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan global.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data untuk memilah dan memfokuskan informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk naratif yang tersusun sistematis, dan penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari perspektif yang berbeda, peningkatan ketekunan dalam membaca referensi yang beragam, serta penggunaan bahan referensi yang kredibel untuk mendukung validitas temuan penelitian.

PEMBAHASAN

INF dan Amerika Serikat

Perjanjian INF merupakan hasil negosiasi panjang antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet yang dimulai pada November 1981, di tengah perlombaan senjata nuklir yang telah dimulai sejak Perang Dunia II. Awal era nuklir ditandai dengan uji coba nuklir pertama AS dan pengeboman Hiroshima-Nagasaki pada 1945, yang segera diikuti oleh Uni Soviet pada 1949, Inggris (1952), Prancis (1960), dan Tiongkok (1964). Untuk mengendalikan proliferasi senjata nuklir, pada 1968 ditandatangani *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), yang berlaku permanen sejak 1995 (UNODA, n.d.). NPT bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir, mendorong penggunaan damai energi nuklir, dan menjadi satu-satunya perjanjian multilateral yang mengikat secara hukum negara-negara bersenjata nuklir untuk perlucutan senjata. Namun, perbedaan penting dengan INF adalah bahwa NPT berfokus pada pencegahan penyebaran, sementara INF secara tegas menghapuskan kategori tertentu senjata nuklir. Meskipun NPT mengurangi jumlah senjata nuklir global dari puncaknya, perjanjian tersebut kurang efektif dalam menghentikan pengembangan senjata baru. Selama 1970-an, AS dan Uni Soviet menandatangani berbagai perjanjian bilateral pengendalian senjata, tetapi jumlah persenjataan tetap meningkat hingga hampir 60.000 unit pada 1980-an.

Pada periode yang sama, kemajuan teknologi rudal balistik, seperti SS-4 Sandal dan SS-5 Skean milik Uni Soviet, memicu kekhawatiran di Eropa. AS merespons dengan penempatan rudal Pershing II dan GLCM di kawasan tersebut. Ketegangan ini mendorong lahirnya *Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty* (INF), yang ditandatangani 8 Desember 1987 oleh Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev. INF berlaku efektif 1 Juni 1988 dan menjadi tonggak sejarah pengendalian senjata karena menghapus seluruh rudal balistik/jelajah darat dengan jangkauan 500-5.500 km. Perjanjian ini mewajibkan penghancuran total 2.692 rudal: 1.846 milik Uni Soviet (termasuk SS-4, SS-5, SS-20, SS-23) dan 846 milik AS (Pershing II, Gryphon GLCM) (Khalid Gill, 2020).

INF juga menciptakan mekanisme verifikasi ketat, termasuk inspeksi di lokasi produksi dan penyimpanan rudal. Keberhasilan awalnya diakui luas, karena mampu mengurangi ketegangan di Eropa dan menciptakan stabilitas strategis. Namun, runtuhnya Uni Soviet pada

1991 mengubah lanskap. Perjanjian yang semula bilateral menjadi multilateral, mencakup Rusia dan lima negara bekas Soviet lainnya. Tantangan baru muncul ketika negara-negara non-pihak, seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Iran, mengembangkan rudal dengan jangkauan yang dilarang INF.

Bagi AS, INF merupakan instrumen strategis untuk mengurangi ancaman langsung di Eropa dari rudal Soviet, sekaligus memperkuat kepemimpinan AS dalam pengendalian senjata global. Selama tiga dekade, AS menghentikan produksi dan pengembangan rudal yang dilarang perjanjian ini. Pemerintahan AS juga meluncurkan kebijakan tambahan seperti *Enhanced Proliferation Control Initiative* (EPCI) untuk membatasi ekspor teknologi senjata pemusnah massal. Dengan status sebagai adidaya tunggal pasca-Perang Dingin, AS memanfaatkan INF sebagai bagian dari strategi mempertahankan stabilitas global.

Namun, seiring waktu, muncul pandangan di kalangan strategis AS bahwa INF mulai membatasi fleksibilitas militer, terutama menghadapi ancaman dari Tiongkok yang tidak terikat pada perjanjian ini.

Pada akhir tahun 2000-an, kekhawatiran AS terhadap relevansi dan efektivitas INF semakin menguat. Rusia, yang mewarisi kewajiban perjanjian dari Uni Soviet, beberapa kali mengisyaratkan niat untuk mundur. Pada 2005, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Ivanov menyampaikan kemungkinan tersebut kepada Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld, menganggap INF sebagai peninggalan Perang Dingin yang tidak lagi relevan. Tahun 2006, pernyataan serupa diulang, menegaskan INF sebagai reliq kuno.

Kecurigaan AS meningkat ketika pada pertengahan 2000-an Rusia mengembangkan rudal darat jarak menengah 9M729 (SSC-8) yang diduga melanggar batasan INF. Dugaan ini diperkuat dengan uji coba pada akhir dekade tersebut. Antara 2014-2017, Departemen Luar Negeri AS secara resmi menuduh Rusia melanggar perjanjian, menuding pengerahan rudal SSC-8 sebagai bukti pelanggaran (US Department of State, 2018). Rusia membantah tuduhan itu dan menuduh balik AS melanggar INF melalui peluncur Mk-41 Aegis Ashore yang dinilai mampu menembakkan rudal jelajah ofensif. Pada 8 Desember 2017, Presiden Donald Trump menegaskan komitmen AS untuk tetap mematuhi INF, sambil mendesak Rusia agar kembali patuh. Namun, pada 20 Oktober 2018, Trump mengejutkan publik internasional dengan mengumumkan rencana penarikan diri AS, beralasan pelanggaran Rusia tidak dapat diselesaikan. Rusia sempat mencoba memberikan transparansi dengan memamerkan rudal 9M729 kepada publik, mengklaim jangkauannya tidak melebihi 500 km. AS menolak klaim ini, mengandalkan bukti intelijen yang dikumpulkan bertahun-tahun. Meski sempat ada penangguhan, AS pada Maret 2019 menyatakan penangguhan kewajiban INF, dan resmi keluar pada 2 Agustus 2019 (VoA Indonesia, 2019).

Keputusan ini menuai kritik dari sekutu AS. Uni Eropa memperingatkan konsekuensi serius bagi keamanan global. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyebut penghentian INF sebagai langkah yang akan menimbulkan konsekuensi negatif. Jepang, melalui Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga, menyatakan kekhawatiran serupa. Kementerian Luar Negeri

Tiongkok mendesak AS untuk mempertimbangkan ulang, menyebut keluar dari INF akan berdampak buruk pada stabilitas global. Rusia menanggapi dengan menarik diri dari INF segera setelah AS keluar. Presiden Vladimir Putin menyatakan Rusia tidak menginginkan perlombaan senjata, berjanji tidak menempatkan rudal kecuali jika AS melakukannya terlebih dahulu. Namun, ia juga memperingatkan bahwa jika AS menempatkan rudal di dekat wilayah Rusia, maka rudal hipersonik Rusia akan diarahkan ke sasaran AS.

Bagi AS, keluar dari INF memberikan kebebasan mengembangkan senjata jarak menengah berbasis darat, yang sebelumnya dilarang. Hal ini dianggap perlu untuk mengimbangi peningkatan kemampuan rudal Tiongkok di Indo-Pasifik, serta menjaga posisi strategis di Eropa Timur menghadapi Rusia. Namun, keputusan ini juga menandai berakhirnya salah satu tonggak kontrol senjata paling penting sejak Perang Dingin. AS menilai bahwa keberadaan rudal SSC-8 Rusia yang memiliki kemampuan manuver tinggi, jarak tempuh di atas 500 km, dan kemampuan membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional, menjadi ancaman langsung bagi pangkalan militer AS dan sekutu di Eropa. Selain itu, perkembangan arsenal rudal Tiongkok yang tidak pernah terikat INF—memperbesar ancaman bagi kepentingan AS di Asia Timur dan Pasifik.

Dari perspektif teori neorealisme, langkah AS keluar dari INF dipahami sebagai upaya memperkuat keamanan dan mempertahankan keunggulan militer di tengah sistem internasional yang anarkis. Dengan kebebasan dari batasan INF, AS dapat merespons ancaman ganda dari Rusia dan Tiongkok secara lebih fleksibel.

Keluar dari INF memperburuk hubungan bilateral yang sudah tegang sejak krisis Ukraina 2014. Kedua pihak saling menuduh pelanggaran perjanjian dan menggunakan isu ini untuk membenarkan langkah-langkah militer ofensif. Rusia memperkuat kehadiran rudalnya di Kaliningrad, yang berdekatan dengan Polandia dan negara-negara Baltik. AS, di sisi lain, meningkatkan kerja sama pertahanan dengan NATO, termasuk rencana penempatan sistem pertahanan rudal di Eropa Timur. Keluarnya AS dari INF berdampak langsung pada kebijakan pertahanan nasional. AS kini memiliki kebebasan mengembangkan sistem rudal jarak menengah berbasis darat, yang dianggap vital untuk strategi di dua front:

- Eropa, untuk mengimbangi dan menekan Rusia di kawasan yang rawan konflik.
- Indo-Pasifik, untuk merespons peningkatan kekuatan rudal Tiongkok, khususnya di Laut Cina Selatan dan sekitar Taiwan.

Akan tetapi, langkah ini juga membawa risiko, termasuk kemungkinan memicu perlombaan senjata dan meningkatkan potensi konflik bersenjata. Tanpa mekanisme verifikasi seperti INF, tingkat saling curiga antarnegara meningkat, mengurangi transparansi dan memperburuk *security dilemma*.

Di sektor militer, keluarnya AS dari INF memungkinkan negara ini mengembangkan dan menempatkan kembali rudal balistik serta jelajah jarak menengah berbasis darat, yang selama tiga dekade dilarang. Langkah ini memberikan fleksibilitas strategis untuk menanggapi

ancaman dari Rusia di Eropa dan Tiongkok di Indo-Pasifik. AS berencana menempatkan sistem rudal konvensional seperti *Long-Range Hypersonic Weapon* (LRHW) dan rudal jelajah berbasis darat di wilayah sekutu, misalnya Jepang atau Guam. Tujuannya adalah menciptakan efek penangkalan (*deterrence*) terhadap potensi serangan musuh.

Namun, peningkatan ini juga membawa konsekuensi:

- Potensi perlombaan senjata di kawasan. Negara lawan akan menanggapi dengan meningkatkan kapabilitas militer mereka.
- Meningkatnya ketegangan di wilayah penempatan rudal, yang dapat menjadi target serangan balasan.
- Biaya besar dalam penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan sistem baru.

Bagi Rusia, keputusan AS menjadi alasan untuk mempercepat produksi rudal 9M729 dan mengembangkan teknologi baru seperti rudal hipersonik Avangard. Rusia menganggap strategi baru AS mengancam stabilitas strategis, sehingga wilayah NATO sah menjadi target jika terjadi eskalasi. Meskipun diskursus utama berfokus pada aspek militer, implikasi lingkungan juga signifikan. Uji coba dan penempatan rudal baru berpotensi meningkatkan polusi kimia dan radioaktif di lokasi uji maupun penyimpanan.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pengujian senjata nuklir meninggalkan residu radioaktif yang dapat mencemari tanah, air, dan udara dalam radius luas. Hal ini menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang, termasuk kanker dan penyakit genetik, bagi penduduk di sekitar lokasi uji.

Selain itu, penempatan sistem senjata baru dapat memicu reaksi publik lokal, baik di AS maupun negara sekutu, yang khawatir akan dampak lingkungan dan keamanan. Protes domestik di Jepang dan Korea Selatan sudah muncul saat wacana penempatan rudal jarak menengah mulai dibicarakan.

Dampak terhadap Negara Lain

Keputusan AS untuk keluar dari INF bukan hanya berdampak pada hubungan bilateral dengan Rusia, tetapi juga memicu perubahan strategis di banyak negara.

Tiongkok, sebagai negara yang tidak pernah terikat INF, telah lama mengembangkan arsenal rudal jarak menengah. Menurut data Departemen Pertahanan AS, sekitar 95% dari 2.000 rudal balistik dan jelajah darat Tiongkok memiliki jangkauan yang akan dilarang oleh INF jika negara itu menjadi pihak perjanjian (Internasional Kontan, 2020). Ketiadaan INF memungkinkan AS merespons langsung kekuatan rudal Tiongkok di Indo-Pasifik, namun hal ini juga mendorong Beijing untuk terus memperluas kapabilitas militernya. Potensi dampak:

- Peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan dan sekitar Taiwan.
- Perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik, melibatkan Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

- Meningkatnya risiko insiden militer yang tidak diinginkan akibat jarak yang semakin dekat antara pangkalan rudal AS dan wilayah Tiongkok.
- Negara-negara sekutu AS di kawasan ini menghadapi dilema: di satu sisi membutuhkan perlindungan dari AS, di sisi lain khawatir menjadi target serangan balasan Tiongkok.

Bagi Rusia, keluarnya AS dari INF adalah legitimasi untuk memperkuat arsenal rudalnya. Selain mengembangkan 9M729, Rusia mempercepat produksi rudal hipersonik yang sulit dicegat sistem pertahanan konvensional. Rusia juga meningkatkan penempatan rudal di Kaliningrad, wilayah eksklave strategis di Eropa Timur yang berdekatan dengan Polandia, Latvia, dan Lituania. Langkah ini memicu kekhawatiran negara-negara NATO, khususnya di Eropa Timur, yang melihat peningkatan ancaman langsung terhadap keamanan mereka.

Data dari *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) menunjukkan bahwa sejak 2020, anggaran militer negara-negara Eropa Timur meningkat signifikan (SIPRI, 2024):

- Polandia: dari USD 13,6 miliar (2020) menjadi lebih dari USD 20 miliar (2023).
- Latvia dan Lituania: kenaikan 13-17% dalam periode yang sama.

Langkah Rusia ini memaksa NATO memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur, meningkatkan risiko konfrontasi langsung di kawasan tersebut.

Kawasan Eropa Timur menjadi salah satu yang paling terdampak setelah keluarnya AS dari INF. Negara-negara seperti Polandia, Latvia, dan Lituania memandang peningkatan kemampuan rudal Rusia, terutama penempatan di Kaliningrad sebagai ancaman langsung. Sebagai respons, negara-negara ini:

- Memperkuat kerja sama pertahanan dengan NATO.
- Meningkatkan anggaran militer secara signifikan.
- Mengajukan penempatan pasukan dan sistem pertahanan tambahan dari AS dan sekutu.

Peningkatan aktivitas militer ini memperbesar risiko insiden militer, mengingat jarak antara kekuatan NATO dan Rusia semakin dekat. Potensi salah perhitungan (*miscalculation*) atau benturan kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis besar. Negara-negara Eropa Barat, seperti Jerman dan Prancis, menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati. Mereka khawatir penempatan rudal AS di Eropa akan memicu respon Rusia yang menjadikan wilayah mereka sebagai target. Jerman, khususnya, menolak ide penempatan rudal jarak menengah berbasis darat di wilayahnya, mengingat pengalaman negatif pada masa Perang Dingin ketika menjadi lokasi rudal Pershing II. Sikap ini menimbulkan perbedaan pandangan di antara anggota NATO antara negara yang ingin memperkuat penangkalan terhadap Rusia (Eropa Timur) dan negara yang mengutamakan diplomasi (Eropa Barat). Perbedaan ini berpotensi melemahkan kohesi NATO dalam menghadapi ancaman bersama.

Kawasan Asia Pasifik menjadi fokus strategis baru bagi AS pasca-INF. Kemungkinan penempatan rudal jarak menengah di Jepang, Korea Selatan, dan Australia memicu reaksi keras dari Tiongkok, yang memandang langkah ini sebagai upaya pengepungan strategis (*strategic encirclement*). Bagi Jepang dan Korea Selatan, isu ini rumit. Mereka membutuhkan perlindungan militer AS untuk menghadapi ancaman Tiongkok dan Korea Utara, tetapi penempatan rudal AS juga berarti mereka menjadi target serangan balasan. Australia relatif lebih terbuka, namun tetap berhati-hati mengingat hubungan ekonominya dengan Tiongkok. Di kawasan ini, keluar dari INF memicu:

- Peningkatan patroli militer dan latihan gabungan AS–sekutu.
- Ekspansi program rudal dan sistem pertahanan udara di negara-negara sekutu.
- Potensi krisis baru di Laut Cina Selatan dan sekitar Taiwan.

Strategi Pasca-INF oleh Amerika Serikat

Setelah keluar dari INF, AS segera mengumumkan serangkaian strategi baru untuk mempertahankan dan memperluas keunggulan militernya:

- Pengembangan Senjata Baru

AS mengalokasikan dana besar untuk penelitian dan pengembangan rudal jarak menengah berbasis darat, termasuk varian konvensional dan hipersonik. Tujuannya untuk mengimbangi kapabilitas Tiongkok dan Rusia.

- Penguatan Aliansi

Meningkatkan kerja sama dengan NATO dan sekutu Indo-Pasifik untuk memastikan dukungan penempatan rudal dan fasilitas militer.

- Postur Militer Fleksibel

Menggeser fokus militer dari pertahanan teritorial ke postur yang lebih mobile dan adaptif, memungkinkan penempatan cepat di titik rawan.

- Diplomasi Selektif

Meskipun keluar dari INF, AS tetap terlibat dalam pembicaraan kontrol senjata, tetapi dengan pendekatan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya—yakni menuntut keterlibatan Tiongkok dalam perjanjian baru.

Reaksi Global

Reaksi global terhadap keluarnya AS dari INF beragam seperti sekutu AS di Eropa Timur mendukung langkah tersebut sebagai bentuk perlindungan, sekutu di Eropa Barat cenderung skeptis dan mendorong solusi diplomatik. negara-negara Asia Pasifik terbelah antara dukungan dan kekhawatiran, Tiongkok dan Rusia mengecam keras dan menilai AS

sebagai pihak yang memicu perlombaan senjata baru, dan Organisasi internasional dan kelompok advokasi perlucutan senjata memperingatkan bahwa keluarnya AS dari INF memperlemah tatanan kontrol senjata global, mengurangi transparansi, dan meningkatkan risiko konflik nuklir.

Berdasarkan temuan di atas, dampak keluarnya AS dari INF dapat diringkas sebagai berikut:

Terhadap Keamanan Nasional AS:

- Memberi kebebasan strategis untuk mengembangkan rudal jarak menengah.
- Memperkuat posisi di Eropa Timur dan Indo-Pasifik.
- Namun, juga meningkatkan risiko keterlibatan langsung dalam konflik regional.

Terhadap Hubungan Internasional:

- Memperburuk hubungan AS–Rusia dan memicu eskalasi militer.
- Menambah ketegangan dengan Tiongkok, khususnya di Asia Pasifik.
- Memecah solidaritas di antara sekutu NATO.
- Terhadap Stabilitas Global:
 - Menghapus salah satu pilar utama kontrol senjata sejak Perang Dingin.
 - Memicu perlombaan senjata dan meningkatkan risiko insiden militer.
 - Mengurangi kepercayaan antarnegara dalam sistem internasional.

Secara keseluruhan, keputusan AS keluar dari INF mencerminkan prioritas keamanan jangka pendek yang mengorbankan stabilitas jangka panjang. Dalam perspektif neorealisme, langkah ini logis sebagai upaya mempertahankan kekuasaan dalam sistem internasional yang anarkis, namun dari perspektif keamanan internasional, tindakan ini justru memperbesar ancaman yang dihadapi semua pihak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian *Intermediate-Range Nuclear Forces* (INF) pada 2 Agustus 2019 memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan global. Keputusan ini diambil dengan alasan pelanggaran yang dilakukan Rusia melalui pengembangan dan penempatan rudal 9M729 (SSC-8) yang dianggap melanggar batasan jangkauan dalam INF. Tindakan AS mendorong Rusia untuk turut menarik diri, sehingga berakhirnya perjanjian ini menandai runtuhnya salah satu pilar utama kontrol senjata nuklir yang telah berlaku sejak 1987. Bagi AS, keluarnya dari INF memberikan kebebasan strategis untuk mengembangkan dan menempatkan rudal jarak menengah berbasis darat, baik di Eropa Timur untuk menghadapi Rusia maupun di kawasan Indo-Pasifik untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok. Meskipun langkah ini memperkuat fleksibilitas militer AS, hal tersebut juga memicu risiko perlombaan senjata, meningkatkan

ketegangan regional, dan membuka kemungkinan keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata. Hubungan AS dengan Rusia memburuk akibat saling tuduh pelanggaran dan eskalasi militer, sementara hubungan dengan Tiongkok semakin tegang karena potensi penempatan rudal di wilayah sekutu AS di Asia Pasifik. Reaksi internasional pun beragam, di mana sekutu di Eropa Timur mendukung langkah AS, sementara Eropa Barat cenderung menolak penempatan rudal tersebut di wilayah mereka. Secara keseluruhan, dari perspektif teori neorealisme, keputusan ini mencerminkan upaya AS mempertahankan kekuasaan dan kepentingan nasional dalam sistem internasional yang anarkis. Namun, dari sudut pandang stabilitas global, langkah ini justru memperlemah tatanan kontrol senjata yang selama lebih dari tiga dekade berperan penting dalam mengurangi risiko konflik nuklir di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Buzan, B. (1983). *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations* (2nd ed.). Wheatsheaf Books.
<https://www.scribd.com/document/367378278/Barry-Buzan-People-States-and-Fear>
- Internasional Kontan. (2020, June 8). Punya 2.200 rudal balistik, China bisa kehilangan 95% - nya jika teken perjanjian. *Kontan*. <https://internasional.kontan.co.id/news/punya-2200-rudal-balistik-china-bisa-kehilangan-95-nya-jika-teken-perjanjian?page=all>
- Khalid Gill, R. (2020, May 10). Analysing INF Treaty: US withdrawal and its implications towards Asian Allies. *Modern Diplomacy*.
<https://moderndiplomacy.eu/2020/10/25/analysing-inf-treaty-us-withdrawal-and-its-implications-towards-asian-allies/>
- Lanoszka, A. (2019). The INF Treaty: Pulling Out in Time. . *STRATEGIC STUDIES QUARTERLY*, 13(2).
- SIPRI. (2024). *Global military spending surges amid war, rising tensions and insecurity*.
<https://www.sipri.org/media/press-release/2024/global-military-spending-surges-amid-war-rising-tensions-and-insecurity>
- UNODA. (n.d.). *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)*. Retrieved August 12, 2025, from <https://disarmament.unoda.org/wmd/nuclear/npt/>
- US Department of State. (2018, December 4). Russia's Violation of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty. *US Department of State*. <https://2017-2021.state.gov/russias-violation-of-the-intermediate-range-nuclear-forces-inf-treaty/>
- VoA Indonesia. (2019, August 3). AS Keluar dari Perjanjian INF. *VoA Indonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/a/as-keluar-dari-perjanjian-inf/5026641.html>

Waltz, Kenneth. N. (1978). *Theory of International Politics* . Addison-Wesley Publishing Company.

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/486328/mod_resource/content/0/Kenneth%20N.%20Waltz%20Theory%20of%20International%20Politics%20Addison-Wesley%20series%20in%20political%20science%20%20%20%201979.pdf

Yuliana P.S, M. R. A. P. S. P. K. P., Putra S, A., & Penny Kurnia P, P. (2020). Analisis Realisme Ofensif Amerika Serikat Keluar dari Intermediate Range Nuclear Force Treaty (INF Treaty). *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 1–11.